

BAB 4

KRISIS GLOBAL 2008 DAN KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI JEPANG DI ASEAN

4.1 Kepentingan Jepang dalam Menanggulangi Krisis

Mengingat Jepang mempunyai volume perdagangan internasional yang besar dan merupakan negara kreditur terbesar di dunia, maka pemerintah Jepang membuat kebijakan ekonomi luar negeri yang berkaitan erat dengan kebijakan dalam negerinya. Dalam merespon krisis, pemerintah Jepang telah mengeluarkan dua kebijakan luar negeri berupa pembentukan kerjasama finansial regional, yang kemudian berhasil dibentuk dalam kerangka CMI, dan bantuan finansial berupa Miyazawa Initiative. Dua kebijakan ini merupakan upaya Jepang untuk menciptakan stabilitas finansial regional sekaligus dalam rangka mengatasi kondisi ekonomi dalam negeri yang sedang dihadapi Jepang.¹

Jepang mempunyai kepentingan besar mengatasi permasalahan krisis. Motif Jepang ini bernuansa politik dan ekonomi. Dari segi politik, krisis Asia bisa mengecilkkan model *Developmental State* yang dipelopori Jepang. *Developmental State* yang memposisikan pemerintah sebagai garda terdepan dalam mengelola ekonomi nasional memang kerap memunculkan ketidaksetujuan AS yang mendukung mekanisme pasar. Sebagaimana pandangan pejabat Kementerian Keuangan AS Robert Rubin dan Lawrence Summer mengenai *Developmental State* berikut ini:

“the problem with model of economic development is that while it was built on the fundamentals-on high savings, high levels of education, and hard work ... (it)... favoured centralized coordination of activity over decentralized market incentives. Governments targeted particular industries, promoted selected exports, and protected domestic industry.

¹ Laporan Tahunan KBRI-Tokyo Jilid II, tahun 1999-2000 Departemen Luar Negeri.

*There was a reliance on debt rather than equity, relationship-driven finance not capital markets, and informal rather than formal enforcement mechanisms”.*²

Developmental State yang diadaptasi oleh sebagian besar negara-negara Asia menurut pandangan IMF merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis Asia. Intervensi pemerintah dinilai gagal dan berkontribusi besar menciptakan permasalahan perekonomian yang berujung pada krisis. Maka dari itu, IMF mengeluarkan salah satu kebijakannya untuk mereformasi sistem pemerintah dan transparansi arus informasi di negara-negara Asia, dengan target memutus praktek kroni-kroni pemerintah yang dinilai telah menciptakan korupsi dan memanipulasi informasi.³

Dari segi ekonomi, krisis Asia semakin menyulitkan Jepang yang sedang dalam proses pemulihan ekonomi. Perekonomian Jepang mempunyai hubungan yang erat dengan kawasan Asia. Interdependensi yang tinggi telah tercipta antara Jepang-ASEAN, keadaan ini menjadikan Jepang harus mempunyai strategi untuk segera memulihkan kondisi perekonomian Asia, agar dampak terhadap perekonomian Jepang menjadi positif.⁴

Perekonomian Jepang mengalami penurunan sejak terjadinya gelembung ekonomi di Jepang sejak tahun 1990-an. Sehingga Jepang lebih banyak fokus

² Lawrence L. Summers, “Emerging from Crisis: The Beginning of a New Asia: Remarks before the Economic Strategy Institute.” 11 Februari 1998, dalam <http://www.ustreas.gov/press/release/pr2217.htm>. (diunduh pada 5 Juli 2010).

³ Shaun Narine, “The Idea of an “Asian Monetary Fund”: The Problems of Financial Institutionalism in the Asia Pasific”, *Asian Perspective*, Vol. 27, No. 2, 2003, hlm 72-73. IMF menyalahkan faktor domestik sebagai akar penyebab krisis Asia. Lihat Paul Bowles, “Asia Post-Crisis Regionalism: Bringin the State Back in, Keeping the (United) States Out”, *Review of Internasional Political Economy*, Vol.9, No. 2, 2002, hlm 235.

⁴ Sebagai perbandingan, dalam krisis Meksiko 1994, Amerika yang mempunyai banyak kepentingan ekonomi di Meksiko segera menyetujui bantuan khusus. Namun dalam kasus krisis ASEAN, Amerika cenderung merespon dengan sangat lambat. Misal, pada awalnya Amerika relatif tidak aktif dalam proses pemberian bantuan ke Thailand. Bahkan AS seperti lebih memanfaatkan krisis yang menimpa ASEAN untuk mendesak negara-negara ASEAN menerapkan ideologi pasar bebas. Sebaliknya Jepang yang punya kepentingan ekonomi lebih banyak dapat dipastikan akan lebih responsif ke krisis ASEAN. Lihat: Phillip Y Lipcy, “Japan’s Asian Monetary Fund proposal”, *Standford Journal of East Asian Affairs*, Vol 3, No. 1, 2003, hlm 97-101.

untuk menyelamatkan perekonomiannya. Dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi domestik, Jepang justru harus menghadapi peristiwa krisis Asia, yang juga berimbas ke Jepang.

Jepang kemudian mengupayakan “internasionalisasi Yen” dengan mendorong penggunaan Yen secara global maupun regional, untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi mata uang Yen terhadap ekonomi Jepang dan mitra utamanya di Asia.⁵

Internasionalisasi Yen sudah dirintis pada masa era kejayaan Jepang 1980-an sampai awal 1990-an. Periode itu merupakan momentum pertama bagi Jepang untuk mewujudkan keinginannya menjadi negara yang mempunyai pengaruh lebih besar dalam sistem moneter dan finansial internasional.

Upaya blok Yen diharapkan dapat menciptakan mata uang dunia dan sistem moneter internasional di Asia yang mendampingi mata uang negara besar seperti Dolar AS dan mata uang kelompok kerjasama Eropa (yang sebelum terbentuk Euro, didominasi oleh Mark Jerman).⁶ Pada saat Jepang berupaya memanfaatkan krisis Asia untuk membentuk blok Yen, Jepang justru menemukan tujuan kebijakan luar negerinya tidak sebatas untuk membentuk blok Yen saja. Karena yang terpenting bagi Jepang pada akhirnya adalah bagaimana agar kondisi Asia menjadi lebih stabil dengan menata kembali jalannya perekonomian secara mandiri dan mampu menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang.

4.2 Krisis Global 2008 dan Penyebabnya

⁵ Upaya internasionalisasi Yen lihat: <http://www.mof.go.jp/english/yen/itiran.htm> . Bahasan wacana blok Yen sebagai mata uang di wilayah sekitar Asia Lihat Jeffrey A Frankel, “Is Japan Creating a Yen Bloc in East Asia and the Pacific?”, *NBER Conference on "Japan and the US in Pacific Asia"*, April 3-5, 1992, California. Jeffrey A Frankel dan Jin Wei Shang, “Yen Bloc or Dollar Bloc? Exchange Rate Policies of East Asian Economies,” dalam *Third Annual NBER - East Asia Seminar on Economics*, Sapporo-Jepang, Juni 17-19, 1992.

⁶ Ulasan mengenai pilihan sistem moneter dunia yang didominasi AS dan didampingi mata uang Eropa, Euro, dan Jepang Yen Lihat Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, New Jersey: Princeton University Press, 2001, hlm 255-258.

Sumber krisis Asia 1998 dan krisis global 2008 memang berbeda sekali. Pada tahun 1998 krisis bersumber dari kelemahan internal negara-negara ASEAN, sedangkan krisis 2008 bersumber dari faktor eksternal Asia, yakni permasalahan ekonomi di wilayah Amerika dan Eropa yang ditandai oleh spekulasi pada produk derivatif berbasis investasi di sektor properti (*subprime credit* dan *collateral debt obligation* dari *subprime credit*), khususnya di Amerika.

Tabel 4.1

Nilai PDB Beberapa Negara 2007

	PDB (US\$ miliar)	% terhadap PDB Dunia
ASEAN	1.278	2,5
Indonesia	433	0,9
Thailand	246	0,5
Malaysia	187	0,4
Singapura	161	0,3
Filipina	145	0,3
Vietnam	71	0,1
Brunei	12	0,0
Myanmar	11	0,0
Kamboja	8	0,0
Laos	4	0,0
Jepang	4.380	8,7
China	3.241	6,4
Korea Selatan	970	1,9
ASEAN+3	11.147	22,0
Uni Eropa	16.586	32,8
Amerika	13.842	27,4
Dunia	50.609	100,0

Sumber: ADB, 2008

Meskipun letak geografis sumber krisis tahun 1998 dan 2008 berbeda, inti krisis tetap dari aspek finansial. Mengingat besarnya skala ekonomi Amerika dan Uni-Eropa (Tabel 4.1), maka krisis di Amerika dan Eropa akan mempunyai efek menular secara global (*global contagion effect*) dari aspek finansial, yaitu pembalikan arah investasi finansial (seperti di saham dan surat utang) dan dari aspek riil, seperti penurunan investasi langsung (FDI), perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada saat krisis global 2008, kondisi fundamental ekonomi ASEAN jauh lebih baik daripada krisis Asia 1998. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, beban utang, keseimbangan neraca luar negeri, dan kondisi kredit perbankan.

Meskipun kondisi fundamental ekonomi makro sangat baik pada tahun 2008, negara-negara ASEAN tetap terkena transmisi efek krisis berupa serangan spekulasi nilai tukar, arus modal keluar yang mengakibatkan menurunnya cadangan devisa, serta jatuhnya harga saham dan obligasi.

Dari pengalaman krisis Asia 1998, negara-negara ASEAN lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri, khususnya utang jangka pendek (*short-term debt*). Meskipun kegiatan ekonomi ASEAN kembali tumbuh tinggi paska krisis Asia, pada tahun 2007 jumlah utang luar negeri jangka pendek hanya naik sedikit, seperti yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, atau turun drastis seperti di Thailand (Tabel 4.2).

Tabel 4.2

Utang Luar Negeri Jangka Pendek & Cadangan Devisa

(dalam Dolar AS Miliar)

		Utang Luar Negeri Jangka Pendek (a)	Cadangan Devisa (b)	Rasio (a) dengan (b)
Indonesia	Mid-1997	34,7	20,3	171%
	2007	35,6	56,9	63%
Malaysia	Mid-1997	16,3	26,6	61%
	2007	17,6	101,1	17%
Filipina	Mid-1997	8,3	9,8	85%
	2007	6,0	30,2	20%
Thailand	Mid-1997	45,6	31,4	145%
	2007	21,8	85,2	26%

Sumber: Djafar, 1998 dan World Bank, 2008

Sedangkan cadangan devisa negara-negara ASEAN di tahun 2007 naik sekitar tiga sampai empat kali lipat dibandingkan dengan tahun 1997 (Tabel 4.2).

Dalam perekonomian global dengan arus finansial yang sangat tinggi memang keperluan cadangan devisa untuk menghadapi serangan spekulasi perlu ditingkatkan. Pada tahun 1997 utang luar negeri jangka pendek relatif besar dibandingkan terhadap cadangan devisa, dimana rasio utang terhadap devisa berkisar 61% (Malaysia) sampai tertinggi 171% (Indonesia). Sedangkan pada tahun 2007 besaran utang luar negeri jangka pendek lebih kecil daripada cadangan devisa, dimana rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa sudah dibawah 30%, kecuali Indonesia yang masih 63%.

Peningkatan cadangan devisa yang lebih cepat dibandingkan perkembangan utang luar negeri jangka pendek memungkinkan setiap negara ASEAN dapat memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas) dengan baik pada saat terjadi krisis global 2008. Peningkatan cadangan devisa negara-negara ASEAN pada era 2000-an berasal dari surplus neraca transaksi berjalan (Tabel 4.3). Hal ini berbeda jauh dengan kondisi tahun 1996-1997 dimana negara-negara ASEAN mengalami defisit transaksi berjalan yang menyebabkan cadangan devisa menurun. Perbaikan kondisi neraca transaksi berjalan pada tahun 2000-an terjadi karena depresiasi besar pada krisis 1998 telah meningkatkan daya saing produk-produk ekspor negara ASEAN.

Tabel 4.3

Keseimbangan Transaksi Berjalan

(dalam persen PDB)

Negara	1996	1997	2006	2007
Indonesia	-3,7	-2,7	3,0	2,4
Malaysia	-5,2	-5,8	16,3	15,7
Filipina	-4,7	-4,5	4,5	4,9
Thailand	-8,0	-3,9	1,1	5,9

Sumber: IMF, 1997 dan World Bank, 2008

Sektor finansial di negara ASEAN juga bersikap lebih konservatif di era 2000-an dalam menyalurkan kredit. Pada saat perbankan negara maju seperti AS dan Eropa agresif menyalurkan kredit di sektor properti yang sedang booming, regulator negara-negara ASEAN membatasi penyaluran kredit ke sektor properti. Sikap konservatif ini terlihat pada proporsi kredit bermasalah negara-negara ASEAN pada tahun 2006-2007 cenderung menurun dan lebih kecil daripada tahun 1997. Karena itu ketika serangan spekulasi terjadi dan bank-bank di AS dan Eropa mengalami kesulitan akibat kredit di sektor properti, sektor finansial di ASEAN dapat bertahan tanpa permasalahan berarti. Indonesia yang sempat mengalami gejolak sistem finansial juga berhasil selamat dari krisis global 2008.

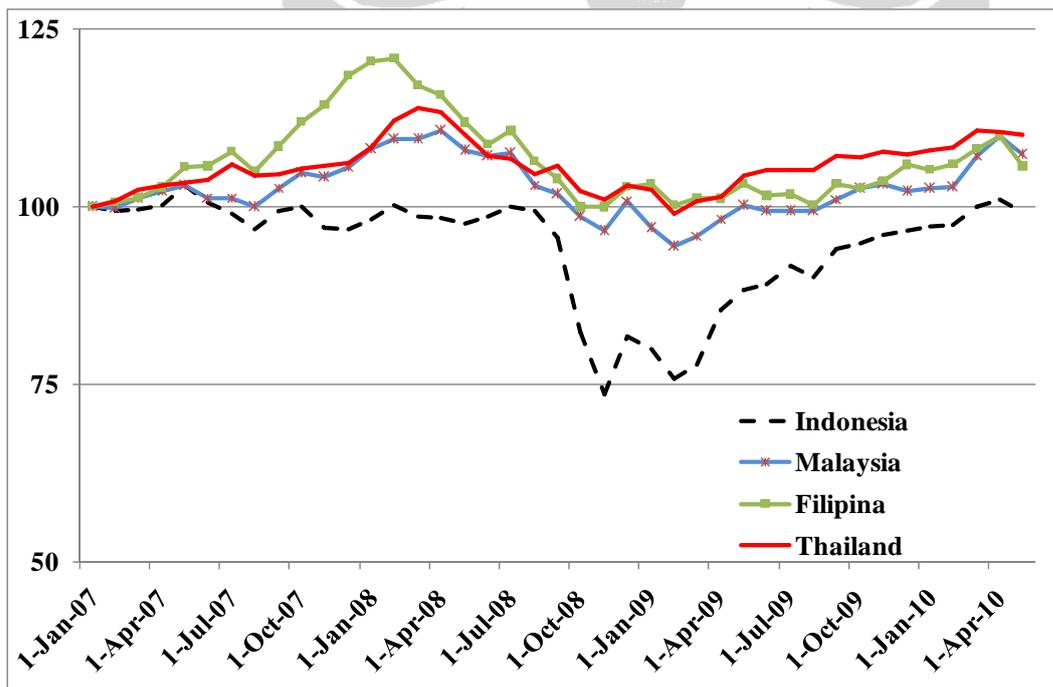
Krisis finansial global mencapai puncaknya di akhir tahun 2008. Krisis mengakibatkan kebangkrutan lembaga finansial berskala global seperti Bear Stearn dan Lehman Brothers. Untuk mencegah krisis semakin parah, Pemerintah harus memberikan bantuan modal ke sektor finansial. Pemerintah AS memberikan bantuan modal ke Citi Group, Fannie Mae, Freddie Mae, dan AIG. Pemerintah Inggris memberikan bantuan modal ke bank Northern Rock dan RBS. Gejolak nilai tukar dan jatuhnya harga saham global yang lebih dari 50% juga menyertai krisis finansial global.

Dalam kasus Indonesia, dua bank (yaitu Bank Indover dan Bank Century) sudah menjadi korban krisis. Bank Indover yang beroperasi di Belanda, diperintahkan pengadilan untuk berhenti operasi dan akhirnya tidak diselamatkan oleh Bank Indonesia sebagai pemilik modal. Sedangkan kegiatan operasi Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjaminan Simpanan.

Transmisi krisis global ke negara-negara ASEAN terlihat dari aspek finansial, misalnya kejatuhan nilai tukar, penurunan indeks harga saham, kenaikan suku bunga, dan berkurangnya cadangan devisa. Dinamika nilai tukar ASEAN sebelum krisis 2008 sangat menarik karena umumnya mengalami penguatan. Dari awal 2007 sampai awal 2008, nilai tukar Malaysia, Thailand, dan Filipina mengalami penguatan sekitar 11%, 14%, dan 21%. Sedangkan nilai tukar Indonesia relatif stabil. Penguatan nilai tukar ini disertai peningkatan cadangan devisa yang diperkirakan karena perpindahan arus modal jangka pendek ke

negara-negara ASEAN. Baru pada sekitar pada April 2008, paska penyelamatan Bear Stearns oleh JP Morgan dengan bantuan dari Federal Reserve AS, nilai tukar di ASEAN mengalami kejatuhan sampai puncak krisis di akhir tahun 2008. Kejatuhan nilai tukar Malaysia, Thailand, dan Filipina dalam periode April – Desember 2008 sekitar 15%, 13%, dan 17% (Grafik 4.1). Sedangkan Indonesia kembali mengalami kejatuhan nilai tukar yang sangat besar, yaitu sekitar 30%. Pelemahan nilai tukar ini hanya sementara. Sejalan dengan meredanya tekanan spekulasi, penguatan nilai tukar kembali terjadi.

Grafik 4.1
Indeks Nilai Tukar Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand
(2007-2010)



Sumber: Bloomberg, 2010

Sedangkan suku bunga di Malaysia, Thailand, dan Filipina tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan Malaysia dan Thailand cenderung mengalami penurunan suku bunga memasuki tahun 2009. Lonjakan suku bunga di

Indonesia juga cukup terkendali, dari sekitar 8% diawal tahun 2008, menjadi 12% pada akhir 2008, dan telah kembali ke 7% pada pertengahan 2009.

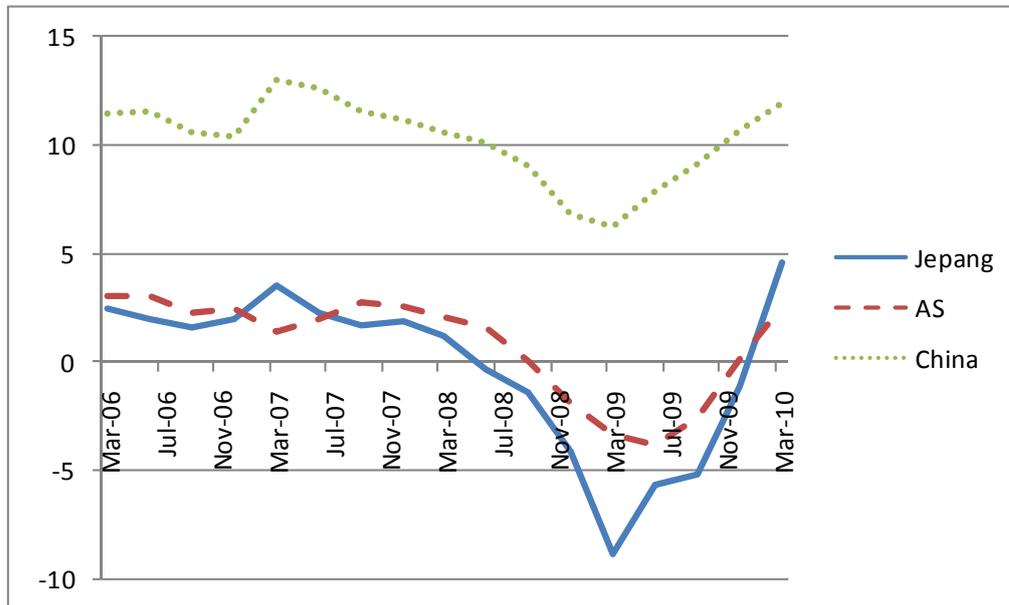
Dalam periode Januari sampai puncak krisis finansial Oktober 2008, kejatuhan yang luar biasa terjadi pada indeks harga saham di Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia yang masing-masing mencapai 40%, 46%, 48%, 51%, dan 54%. Ini menandakan betapa efek psikologis investor di bursa saham sangat dipengaruhi oleh kejatuhan bursa-bursa saham global.

Relatif terkendalinya kondisi finansial meskipun bursa saham mengalami gonjangan dan cepatnya stabilisasi nilai tukar dan suku bunga dikarenakan besarnya cadangan devisa yang ada, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Awalnya investor global khawatir negara ASEAN dapat mengalami krisis seperti tahun 1998, sehingga terjadi arus keluar modal yang sangat besar. Dengan cadangan devisa yang besar, kewajiban membayar proses konversi arus modal keluar ini dapat terpenuhi. Misalnya, Indonesia yang paling besar mengalami kejatuhan nilai tukar dan indeks harga saham, mengalami penurunan cadangan devisa sebesar US\$10 miliar (sekitar 17% dari total cadangan devisa) pada semester kedua 2008.

Memang negara ASEAN berhasil keluar dari krisis finansial. Namun sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dunia (Lihat Grafik 4.2), kegiatan ekonomi ASEAN juga terkena imbasnya melalui penurunan perdagangan internasional dan perlambatan pertumbuhan ekonomi (Lihat Grafik 4.3).

Grafik 4.2

Pertumbuhan Ekonomi Utama Dunia (2006 – 2010)



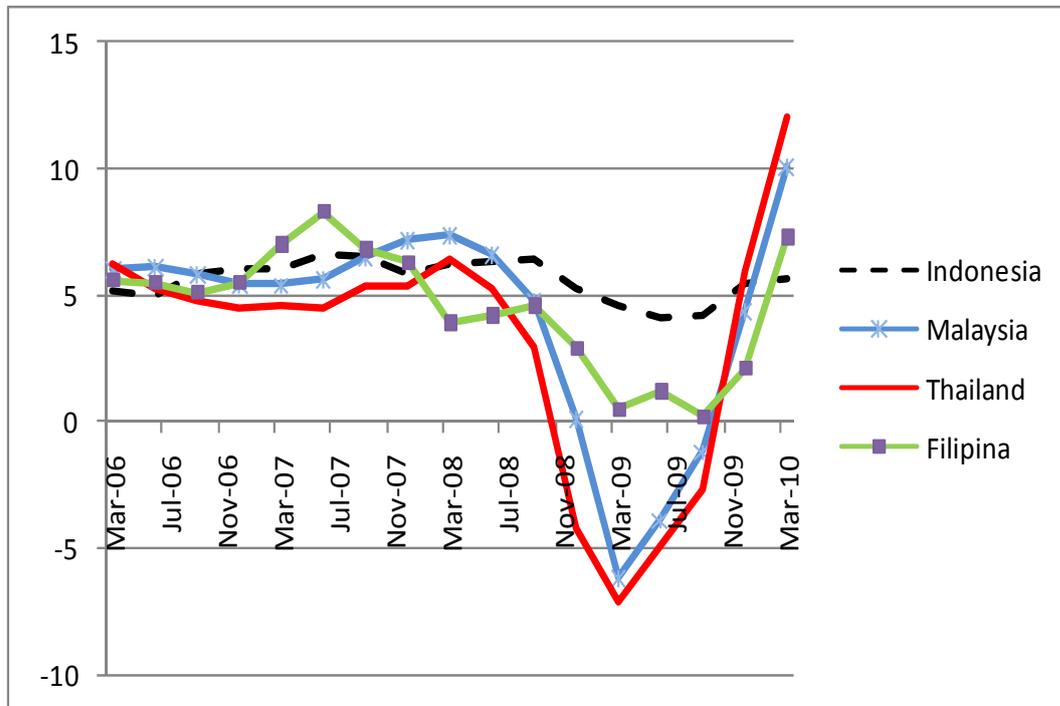
Sumber: Bloomberg, 2010

Siklus krisis biasanya diawali dengan gejolak pada sistem finansial, sedangkan pengaruhnya pada sektor riil terjadi beberapa periode kemudian. Bila dampak finansial dapat terlihat dengan segera pada awal sampai akhir tahun 2008, maka dampak ekonomi riil, melalui kaitan perdagangan internasional dan investasi langsung, mulai dirasakan berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada akhir 2008 dan tahun 2009.⁷

⁷ Lihat <http://data.worldbank.org> (diunduh pada 2 Juli 2010)

Grafik 4.3

**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina
(2006-2010)**



Sumber: Bloomberg, 2010

Semakin besar porsi perdagangan internasional terhadap total PDB dan semakin terbuka sebuah perekonomian terhadap arus modal global, maka semakin besar dampak krisis global terhadap negara tersebut.⁸ Dibandingkan Malaysia dan Thailand, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih stabil di tahun 2007-2008, berbeda jauh dengan kondisi di tahun 1998. Sebagai negara yang memiliki porsi perdagangan lebih besar dalam ekonominya, Malaysia dan Thailand mengalami penurunan kegiatan ekonomi yang lebih besar daripada Indonesia dan Filipina. Padahal bila dilihat dari dampak krisis finansial terhadap gejolak finansial di ASEAN, Indonesia merupakan yang paling terpengaruh. Orientasi kegiatan ekonomi Indonesia yang lebih didominasi konsumsi domestik berhasil membantu

⁸ Lihat studi HSBC, 2006, Morgan Stanley 2009

Indonesia bertahan terhadap dampak riil dari penurunan kegiatan ekonomi global akibat krisis finansial 2008.

Perlu ditekankan disini, meskipun geografis sumber krisis tahun 1998 dan 2008 berbeda, inti krisis tetap dari aspek finansial. Ini mengingatkan bahwa proses globalisasi yang tujuannya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sektor riil ternyata telah didominasi oleh globalisasi sektor finansial yang manfaatnya belum dapat dipastikan⁹.

4.3 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Jepang pada Masa Krisis Global 2008

4.3.1 Mendukung Pengembangan CMI menjadi CMIM

Terjadinya kembali krisis global 2008, manandakan bahwa masalah finansial memang kerap menimbulkan kejadian yang berujung pada krisis. Pembahasan mengenai pembentukan kerjasama yang selalu disuarakan Jepang kian menunjukkan perkembangannya. Salah satunya membentuk Chiang Mai Initiative Multilateral (CMIM).

Dari serangkaian data yang diperoleh, diketahui bahwa kebijakan luar negeri Jepang pada masa krisis global 2008 tidak jauh berbeda dengan kebijakannya saat mengatasi krisis Asia 1998. Jepang tetap menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan kerjasama CMI.

Untuk itulah, hipotesa kedua penulis terbukti, dimana kebijakan luar negeri Jepang di ASEAN mengalami kesinambungan. Kesinambungan ini dapat dilihat dari: *pertama*, yang diusung Jepang tetap CMI dan dana yang dikeluarkan Jepang juga merupakan yang terbesar dibandingkan negara lainnya. *Kedua*, tokoh-tokoh Jepang yang berperan untuk mengatasi krisis juga tetap sama, yakni dari kalangan MOF Jepang, seperti Eisuke Sakakibara, Haruhiko Kuroda (pernah

⁹ Jacques B Gelin, “ *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*”, London: Zed Books, 2003, hlm 41. Martin Wolf, “*Unfettered Finance is Fast Reshaping the Global Economy*”, Financial Times, 18 Juni 2007, mengulas dominasi aspek finansial dalam proses liberalisasi dan globalisasi ekonomi dunia. Lihat Dani Rodrik dan Arvind Subramanian, “Why Did Financial Globalization Disappoint”, *Working Paper*, 2008 untuk survei literatur globalisasi finansial dan kelemahannya.

menjabat sebagai Direktur Biro Internasional MOF, lalu menjadi wakil menteri keuangan bagian internasional), dan Masahiro Kawai. Tokoh-tokoh ini melanjutkan ide-ide pembentukan AMF melalui CMI.

Dalam perkembangan karirnya, Haruhiko Kuroda saat ini menjadi presiden ADB, sementara Masahiro Kawai pernah menjabat sebagai *Office for Regional Economic Integration* di ADB. Dipegangnya ADB oleh Kuroda dan Kawai menjadikan ADB yang sebelumnya lebih banyak fokus pada masalah pengurangan kemiskinan menjadi sebuah lembaga yang mendorong pembentukan institusi finansial regional, pengelolaan, dan pengawasan moneter bersama.

Sikap pemerintah Jepang diatas menandakan konsistensinya untuk tetap berupaya memegang komitmen dalam memperjuangkan kebijakan luar negeri Jepang. Jika saat terjadi krisis Asia 1998 Jepang dinilai gagal mewujudkan AMF, pada krisis global 2008 Jepang justru menjadi “pahlawan” yang berhasil melahirkan suatu strategi kerjasama untuk menaggulangi krisis melalui kerangka CMI.

Pada setiap kesempatan publik Kawai selalu konsisten menegaskan bahwa CMIM akan menjadi AMF secara *de facto*.¹⁰ Dalam makalahnya baru-baru ini, Kawai menegaskan:

“Given the Asian countries’ aversion to requesting IMF financial assistance and their limited access to US dollar swap lines, it is critical that the CMIM would become usable without IMF-links. Essentially, the CMIM process needs to evolve into an Asian Monetary Fund (AMF), an independent regional financing facility.”

Sikap Kawai ini mendapat respon positif dari pejabat tinggi negara-negara Asia. Misalnya pada saat pertemuan menteri keuangan di Kyoto, para menteri

¹⁰ Misalnya dalam konferensi ADB, “The (strengthened) CMI has the potential to become an Asian Monetary Fund”. Lihat Yong Wook Lee, “Regional Financial Solidarity without the United States: Contested Neoliberalism in East Asia, *EAI Asia Security Initiative Working Paper*, Korea University, 2009.

secara terbuka menyatakan perlunya untuk mengimplementasikan CMIM sejak dikeluarkannya wacana CMIM pada tahun 2006.

Untuk mengembangkan kerjasama finansial Asia kedepan, Kawai menyampaikan pandangannya bahwa wilayah Asia mempunyai prospek sebagai blok ekonomi terbesar dunia pada tahun 2050. Maka dari itu, Asia harus memiliki mata uang bersama untuk menurunkan biaya transaksi dan melindungi kebijakan domestik dari pengaruh eksternal. Seperti pernyataan Kawai berikut ini:

“Instead, it shows that to achieve monetary union, you need lots of preparation. First is to make sure the economies are integrated. Barriers must come down so that investment, trade, finance, and people can move freely across economies”.

Pada saat bersamaan, sikap terbuka Kawai dan para pejabat ASEAN+3 yang terkait dengan pembentukan lembaga seperti AMF tidak lagi mendapat kritik dan tantangan secara frontal dari AS. Kondisi ini merefleksikan dinamika geopolitik dimana terjadinya krisis global yang bersumber di AS dan membuat ekonominya menjadi lemah. Sedangkan disisi lain, perekonomian negara-negara ASEAN+3 khususnya ASEAN dan China berada jauh lebih baik daripada kondisi AS.

Sikap Kawai ini dapat juga dipandang mewakili pemikiran dan perlawanan Asia secara menyeluruh terhadap dominasi AS dalam wacana ekonomi global. Apalagi China sebagai kebangkitan ekonomi terbesar Asia juga berani mengkritik AS bahkan lebih jauh lagi mengusulkan perlunya dibentuk mata uang dunia alternatif dari Asia yang akan mengimbangi mata uang Asia dan Eropa.¹¹

Akan tetapi, keadaan telah berubah, kalau dulu AS bisa saja menolak segala usulan Asia untuk membentuk sesuatu yang sifatnya mengangkat tema

¹¹ The Wall Street Journalm “China Takes Aim at Dollar, 24 Maret 2009, lihat <http://online.wsj.com/article/SB123780272456212885.html>, hal ini juga sangat disadari oleh AS, seperti terlihat dalam laporan Dick K. Nanto, ” The Global Financial Crisis: Foreign and Trade Policy Effects”, 2009.

regional. Saat ini AS tentu tidak mampu menolaknya, mengingat keadaan AS semakin terpuruk akibat krisis global.

4.4 Respon Jepang dan ASEAN dalam Menghadapi Krisis Global 2008

Membaiknya kondisi fundamental ekonomi, memungkinkan negara ASEAN selamat dari krisis global 2008. Memang terjadi gejolak finansial seperti kejatuhan nilai tukar, indeks harga saham, dan penurunan cadangan devisa. Bahkan Malaysia, Thailand, dan Singapura juga mengalami kontraksi ekonomi sektor riil di tahun 2009. Guncangan ekonomi ini tidak berarti bila dibandingkan yang terjadi pada saat krisis Asia 1998. Pada akhir 2009 sudah terjadi stabilisasi ekonomi riil dan memasuki 2010 ekonomi ASEAN telah pulih. Terbatasnya dampak krisis global 2008 terhadap ASEAN menjadi faktor mengapa Jepang tidak melakukan respon besar-besaran sebagaimana pernah terjadi pada krisis Asia 1998.

Secara umum negara ASEAN+3 merespon krisis global 2008 dengan melakukan stimulus fiskal dan moneter untuk meminimalkan kontraksi ekonomi. Stimulus fiskal dan moneter ini bisa dilakukan karena ekonomi ASEAN+3 relatif lebih baik dibandingkan pada saat krisis 1998. *Bank of Japan*, sebagai Bank Sentral dari ekonomi terbesar Asia menurunkan suku bunga ke 0,10% pada akhir 2008 yang merupakan terendah dalam sejarah.

Dari segi ekonomi internasional, Jepang memberikan pinjaman US\$100 miliar ke IMF untuk program dana bantuan bagi negara berkembang, melakukan investasi US\$2 miliar di World Bank untuk program rekapitalisasi bank di negara berkembang, meningkatkan investasi modal di ADB, dan mendukung transaksi perdagangan internasional melalui *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC).

Bersama Korea dan China, Jepang melaksanakan pertemuan di Fukuoka-Jepang, pada Desember 2008 untuk membahas masalah krisis global. Pertemuan ini tidak menyertakan negara ASEAN. Hal ini tidak berarti Jepang mengabaikan ASEAN. Pertemuan eksklusif Jepang, China, dan Korea dapat dilihat sebagai

upaya ketiga negara besar ini untuk menyamakan persepsi guna meminimalkan potensi konflik politik dalam merespon krisis global 2008 dalam skala regional. Kebersamaan ini efektif mencegah konflik kepentingan seperti yang terjadi pada saat krisis 1998, dimana Jepang mengusulkan pembentukan AMF tetapi ditolak oleh China.

Dalam pertemuan Fukuoka tersebut, Bank Sentral China dan Korea menyetujui perjanjian bilateral swap sebesar US\$39 miliar. Bank Sentral Jepang dan Korea juga menyetujui peningkatan bilateral swap mencapai US\$20 miliar. Respon yang cepat dan kerjasama ketiga ekonomi terbesar Asia ini menunjukkan betapa upaya regional sangat strategis dalam menghadapi krisis global.

Terkait dengan ASEAN, Jepang memberikan komitmen untuk terus meningkatkan investasi di ASEAN guna mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi regional karena perlambatan ekonomi di wilayah Amerika dan Eropa. Jepang juga mendukung ASEAN untuk membentuk “*Asian Financial Stability Dialogue*” yang bertujuan pengawasan dan regulasi finansial regional guna menciptakan sistem peringatan dini krisis.

Sehubungan dengan CMI, Meskipun dana CMI belum digunakan hingga terjadinya krisis global 2008, negara-negara ASEAN optimis proses pencairan dana CMI dapat dilakukan pada tahun 2010 ini.¹² Apalagi CMI telah mencapai momentumnya sebagai simbol kerjasama finansial Asia, yang tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah dana.

Pada Juni 2009, BSA CMI antara ASEAN+3 telah mencapai nilai US\$90 miliar, naik dari US\$80 miliar di tahun 2008. Pada pertemuan ASEAN+3 di Madrid, Mei 2008, proses multilateralisasi CMI yang menjadi wacana pertemuan ASEAN+3 di India 2006 telah disetujui.

Dalam pertemuan ASEAN+3 di Madrid, juga ditegaskan kembali mengenai komitmen bersama untuk membahas masalah spesifik mekanisme

¹² “Realisasi Dana Chiang Mai Diharapkan Cair Awal Tahun Depan”, Kompas, 24 Oktober 2009, <http://m.kompas.com/news/read/data/2009.10.24.16080296> (diunduh pada 15 Juni 2010).

pelengkap proses multilateralisasi yaitu “*economic surveillance, borrowing accessibility, activation mechanism, decision making rules and lending covenant*”.¹³

4.4.1 Peningkatan Kontribusi Dana CMIM

Krisis global 2008 mendorong peningkatan nilai perjanjian bilateral swap dan proses multilateralisasi CMI (CMIM). CMIM menyertakan komitmen peningkatan besaran dana yang disediakan menjadi US\$120 miliar pada tahun 2010. Dalam CMIM ini, Jepang tetap menempati urutan pertama sebagai negara yang memberikan kontribusi terbesar. Hal ini menunjukkan kesinambungan komitmen Jepang sebagai negara penyedia dana utama. Jika China sebelum krisis 2008 tidak begitu menunjukkan posisinya dalam CMI, pada 2008 justru China menampilkan keagresifannya sebagai negara kontributor terbesar kedua setelah Jepang (dana China digabung dengan dana Hong Kong) (Lihat Tabel 4.4).

Dalam CMIM ini, negara dapat melakukan swap atas mata uang domestiknya dengan Dolar AS, maksimal sebesar nilai kontribusi dikalikan angka pengganda pembelian. Misalnya, Indonesia yang mempunyai kontribusi sebesar US\$4,77 miliar, maksimal menerima bantuan US\$11,93 miliar.

Proses pembentukan CMIM bersifat lebih formal dibandingkan CMI yang sebenarnya masih merupakan “*institusi virtual*” (Katada, hlm. 10). Karena CMIM memerlukan mekanisme pengawasan regional, aktivasi swap, dan jaminan pembayaran kembali. Maka dari itulah disetujui agar pertemuan rutin “*Economic Review and Policy Dialogue*” dalam CMI segera merumuskan fungsi-fungsi tersebut.

¹³ “*Joint Ministerial Statement of the 11th ASEAN Finance Ministers’ Meeting*”, lihat: http://www.mof.go.jp/english/if/as3_080504.htm (diunduh pada 2 Juli 2010)

Tabel 4.4

Chiang Mai Initiative Multilateral

	Kontribusi keuangan		Angka Pengganda Pembelian		
	US\$ (miliar)	%			
China	38,40	China (di luar Hong Kong) 34,20	32,00	28,50	0,5
		Hong Kong 4,20		3,50	2,5
Jepang		38,40	32,00		0,5
Korea		19,20	16,00		1
Plus 3		96,00	80,00		-
Indonesia		4,77	3,97		2,5
Thailand		4,77	3,97		2,5
Malaysia		4,77	3,97		2,5
Singapura		4,77	3,97		2,5
Filipina		3,68	3,07		2,5
Vietnam		1,00	0,83		5
Kamboja		0,12	0,10		5
Myanmar		0,06	0,05		5
Brunei Darussalam		0,03	0,02		5
Laos		0,03	0,02		5
ASEAN		24,00	20,00		-
Total		120,00	100,00		-

Sumber: MOF, 2009

Terkait dengan manfaat CMI, pengalaman Korea pada krisis 2008 sangat relevan bagi kerjasama finansial regional ASEAN+3 dimasa mendatang. Pada tahun 2008 Korea menghadapi masalah likuiditas akibat kejatuhan nilai tukar dan berkurangnya cadangan devisa. Pada Maret 2008 cadangan devisa adalah US\$264 miliar, akibat serangan spekulasi terhadap Won Korea, cadangan devisa Korea menurun menjadi US\$200 miliar pada akhir 2008.

Menghadapi krisis likuiditas, Korea memutuskan mencari bantuan berupa kerjasama bilateral swap dengan AS sebesar US\$30 miliar pada Oktober 2008. Kebijakan Korea ini efektif menstabilkan kondisi finansial Korea.

Ada dua alasan mengapa CMI tidak menjadi pilihan Korea, yaitu: *Pertama*, menggunakan fasilitas CMI berarti Korea harus mengikuti program IMF. Dalam penggunaan dana lebih dari 20% total dana CMI memang harus disetujui IMF. Padahal, trauma program IMF dalam krisis 1998 akan menimbulkan dampak politik domestik bila Korea kembali meminta bantuan IMF. *Kedua*, total dana BSA dari Jepang dan China untuk Korea masing-masing sebesar US\$3 miliar dan US\$4 miliar, sangat kecil dibandingkan dengan besaran dana yang diperlukan Korea.

Karena itu, CMIM harus mempunyai mekanisme yang tidak terkait dengan IMF. CMIM juga perlu memprioritaskan mekanisme pengawasan regional, aktivasi swap, dan penjaminan pembayaran kembali agar benar-benar dapat berjalan dalam skala dan kecepatan yang diperlukan untuk mengatasi krisis likuiditas regional.

Tabel 4.5
Cadangan Devisa
(dalam Dolar AS Miliar)

	1997	2008
Indonesia	17,5	51,6
Malaysia	21,5	92,2
Filipina	8,7	37,5
Thailand	26,9	111,0
Singapura	71,4	174,2
Jepang	226,7	1.030,8
China	146,4	1.946,0
Korea	20,5	201,5
Total	539,6	3.644,8

Sumber: World Bank, 2009

Bila dilihat dari besarnya cadangan devisa yang di miliki negara ASEAN+3 (Tabel 4.5), maka usulan negara ASEAN untuk menargetkan dana CMIM sebesar US\$300 miliar sampai US\$400 miliar (atau 10% dari total

cadangan devisa ASEAN+3) sangat mungkin untuk direalisasikan. Dengan dana yang sangat besar itu, tentunya negara besar seperti Korea pun dapat memenuhi keperluan likuiditasnya dari CMIM.

Perlu diperhatikan bahwa selain CMI, komponen kerjasama regional finansial seperti ABMI dan ABF (*Asian Bond Fund*) juga kembali didorong. Memang diantara ketiga bentuk kerjasama finansial regional ASEAN+3, kerangka CMI merupakan yang paling maju. Bila CMI dan proses multilateralisasinya dapat dilihat sebagai kerangka untuk menghadapi krisis pada saat terjadi, maka ABMI dan ABF merupakan kerangka untuk menciptakan sistem finansial yang stabil dan kuat menggunakan dana regional.

Lagi-lagi gejolak akibat aliran modal keluar saat krisis 2008 menjadi pelajaran bahwa sistem finansial di wilayah Asia dapat lebih stabil bila sumberdaya finansial yang ada dikelola melalui sebuah institusi regional, seperti wacana ABMI dan ABF agar dapat memenuhi keperluan investasi masing-masing negara. Menggunakan dana yang mungkin dikumpulkan dalam ABF dan menggunakan mekanisme ABMI, proses aliran dana antar negara Asia menjadi lebih optimal dan dapat memenuhi sebagian keperluan investasi domestik. Ketergantungan pada modal dari AS dan Eropa, khususnya berupa utang jangka pendek, dapat diminimumkan. Sehingga potensi gejolak sistem finansial akibat aliran dana asing jangka pendek dapat dikurangi.

Besarnya komitmen negara-negara Asia dalam upaya menjaga stabilitas finansial regional ini membuat popularitas IMF semakin menurun. Untuk itulah IMF melakukan perubahan drastis untuk memberikan pinjaman tanpa persyaratan bagi negara yang memerlukan likuiditas.¹⁴

¹⁴ “Kemudahan Pemberian Dana Jadi Acuan Chiang Mai Initiative”, <http://www.antaraneews.com/berita/1256401390> (diunduh pada 15 Juni 2010)

4.4.2 Dinamika Geopolitik dan Kerjasama Finansial Regional

4.4.2.1 Jepang, ASEAN, Vs AS

Bagi Jepang dan ASEAN, krisis global kembali mengingatkan bahwa kondisi fundamental ekonomi yang kuat tidak cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi masing-masing negara. Adanya efek menular dari krisis menjadi bukti bahwa permasalahan yang ada di sebuah negara dapat berdampak negatif pada negara-negara terkait di sekitarnya. Karena itu, upaya menjaga stabilitas ekonomi mempunyai dimensi domestik dan regional.

Sebagai landasan utama, penguatan dan stabilitas ekonomi domestik masing-masing negara harus dijaga untuk dapat menciptakan suatu kerjasama yang memungkinkan menghadapi krisis secara bersama dalam konteks regional.

Kendala realisasi kerjasama finansial regional bukan hanya dari aspek ekonomi. Jepang sebagai sebuah negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia selalu menunjukkan komitmen kuat menyediakan sumber dana untuk kerjasama finansial regional. Apalagi Jepang memang sudah sejak awal menjadi pemilik modal utama lembaga finansial regional seperti ADB. Meski besaran kepemilikan modal Jepang di ADB sama seperti AS, tapi dominasi pengaruh Jepang di ADB terlihat dalam hal posisi Presiden ADB yang selalu dipegang oleh orang Jepang.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3, kendala realisasi kerjasama regional finansial pada akhir dekade 1990-an muncul dari aspek persaingan politik antara kekuatan ekonomi besar dunia, seperti AS, Jepang, dan China.

Pada krisis global 2008, konteks persaingan Jepang dan AS telah mengalami pergeseran perimbangan. Pergeseran perimbangan ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: *Pertama*, sumber dan pusat krisis. *Kedua*, perimbangan kekuatan ekonomi. *Ketiga*, pertentangan ideologi ekonomi dan pembangunan.

Dari aspek sumber krisis, pada tahun 1998 negara-negara Asia adalah korban yang tidak berdaya menghadapi pengaruh AS dan IMF yang menjadi institusi pengendali program bantuan finansial. Pada tahun 1998 Jepang masih

dalam kondisi krisis dan dianggap menjadi penyebab krisis Asia. Sebaliknya, pada tahun 2008 AS lah yang menjadi sumber dan penyebab krisis.

Dari aspek perimbangan kekuatan ekonomi, pergeseran ini berupa melemahnya ekonomi AS yang selama ini dianggap sebagai ekonomi terbesar dunia yang menentukan arah dan ideologi ekonomi global. Ekonomi Jepang sendiri masih belum benar-benar stabil, namun melemahnya ekonomi AS kembali menempatkan posisi Jepang relatif lebih berimbang.

Dengan kondisi ekonomi domestik ASEAN yang jauh lebih baik juga memungkinkan negara-negara anggotanya bersikap lebih independen pada tahun 2008. Kepemilikan cadangan devisa negara-negara ASEAN yang besar memungkinkan menghadapi serangan spekulasi nilai tukar, meskipun tetap terjadi depresiasi nilai tukar sekitar 15%-25% untuk masing-masing negara.

Kondisi ekonomi ASEAN yang sehat dapat menjadikan ASEAN sebagai mitra kerja Jepang yang dapat mengimbangi kekuatan ekonomi AS dan membantu Jepang merealisasikan rencana penguatan dan percepatan kerjasama finansial regional seperti CMI.¹⁵

Dari aspek ideologi ekonomi dan pembangunan, pada tahun 1998 ideologi *Developmental State* yang diprakarsai Jepang dikritik sebagai penyebab krisis yang berimbas pada kegagalan intervensi pemerintah dan menyumbang kelemahan ekonomi Asia sehingga rentan terhadap gejolak finansial global. Pada tahun 2008, AS pun melakukan tindakan serupa dengan mengintervensi lembaga besar finansial AS dengan menempatkan bantuan pemerintah untuk menyelamatkan bank-bank AS. Akibatnya, ideologi ekonomi liberal ala AS, kembali dipertanyakan konsistensinya, baik oleh masyarakat AS maupun oleh masyarakat negara barat seperti Eropa dan Kanada yang mengedepankan mekanisme ekonomi.

¹⁵ Dick K. Nanto, 2009, "The Global Financial Crisis: Foreign and Trade Policy Effects", Congressional Research Service (www.crs.gov), hlm. 23

Sebaliknya, Jepang dapat kembali menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi. AS yang selama ini mengusung ekonomi liberal dan mekanisme pasar ternyata menjadi pelaku utama membatasi bekerjanya mekanisme pasar. Sikap skeptis dan kritis AS terhadap peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi berbalik arah menjadi membenarkan intervensi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi.

Jepang pada tahun 2008 juga telah berhasil merangkul Cina sebagai mitra dalam mengedepankan kerjasama finansial regional. Keterlibatan China semakin melengkapi kebersamaan Asia karena China menjadi kekuatan ekonom baru di Asia. Jepang, China, Korea, dan ASEAN memiliki kesamaan ideologi dan sama-sama merasa sering disudutkan oleh wacana kebijakan ekonomi politik AS.¹⁶

4.4.2.2. Jepang, China, Vs AS

Pada akhir tahun 1980-an, Jepang mencapai puncak kejayaan ekonominya dan merupakan ekonomi terbesar kedua dunia dengan kontribusi sekitar 14% terhadap total PDB Dunia. Saat itu, kontribusi China sekitar 1,6% PDB Dunia. Dengan pertumbuhan yang rata-rata mencapai 10% per tahun sepanjang 1990-2008, pada tahun 2008 China menjadi ekonomi nomor tiga terbesar dunia (Tabel 4.6).

Tabel 4.6

Porsi PDB AS, Jepang, China, Terhadap Ekonomi Dunia

(dalam Persen)

	1990	2000	2005	2008
AS	26,6	31,1	27,6	23,3
Jepang	14,0	14,8	10,2	8,1
China	1,6	3,8	5,0	7,1

Sumber: World Bank, 2009

¹⁶ AS sering mengkritik China sebagai manipulator nilai tukar yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi global dan memberi kontribusi pada krisis finansial global 2008.

Besaran PDB China sudah sekitar 90% PDB Jepang, dan mengalahkan Jerman yang selama ini merupakan ekonomi terbesar ketiga dunia.

Dilihat dari kepemilikan cadangan devisa dunia (Tabel 4.5), maka China pada tahun 2008 merupakan negara dengan cadangan devisa terbesar dunia dan memiliki hampir dua kali lipat cadangan devisa Jepang.

Posisi China sebagai ekonomi terbesar ketiga jelas menjadi dualisme dalam kepemimpinan ekonomi Asia. Apalagi kegiatan ekonomi ASEAN dengan China meningkat pesat, sedangkan kegiatan ekonomi ASEAN dengan Jepang semakin menurun.

Jepang sebagai negara paling maju dan mempunyai peran besar dalam membentuk model pembangunan Asia tetap menjadi aktor penting. Selain perubahan sikap China yang sebelumnya tidak mendukung AMF, namun kemudian mendukung CMI, era pertengahan 2000-an juga ditandai dengan sikap China yang merasa perlu mengembangkan kekuatan regional untuk menyeimbangi AS yang terlalu mendominasi wacana ekonomi global.

Misalnya Bernanke (2005) memandang salah satu penyebab masalah defisit perdagangan AS sebagai akibat kebijakan ekonomi China yang berorientasi ekspor, memanipulasi nilai tukar, dan tidak mempromosikan konsumsi domestik.¹⁷

Bila pada masa lalu tindakan AS yang mencoba mendominasi wacana ekonomi global tidak akan direspon oleh China dengan frontal, maka pada era pertengahan 2000-an China merasa layak mendapat posisi yang lebih terhormat.

Hal ini diobservasi oleh majalah *Economist*, sebagaimana dikutip dalam Nanto (2009):

China's prime minister, Wen Jiabao, no longer sticks to the script that China is a humble player in world affairs that wants to focus on its own economic development. He talks of China as a "great power" and worries

¹⁷ *Ibid*, hlm 22

*about America's profligate spending endangering his \$1 trillion nest egg there. ...Already a big idea has spread far beyond China: that geopolitics is now a bipolar affair, with America and China the only two that matter*¹⁸.

Sikap China yang ingin memiliki peran lebih besar dalam ekonomi dunia juga diperlihatkan dalam bentuk upaya China melakukan kerjasama pasokan komoditas strategis seperti minyak, bahan tambang, dan bahan makanan. Terkait kerjasama regional, China aktif melakukan kerjasama bilateral swap untuk keperluan transaksi perdagangan barang dan jasa dengan Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Belarus and Argentina, dengan total perjanjian mencapai Yuan 650 miliar (atau US\$95 miliar).

Pada krisis Asia 1998, AS meskipun hanya memberi kontribusi kecil dalam program bantuan IMF ke Asia, mencoba mengatur Jepang dan China dalam mengatasi krisis. AS yang mengkritik dan mengajari negara-negara Asia bagaimana mengelola ekonomi yang baik dengan mengadopsi prinsip-prinsip mekanisme pasar. Akibatnya wacana Jepang mendirikan AMF pun digagalkan AS dengan bantuan China.

Sebaliknya, pada krisis 2008 China memperlihatkan identitasnya sebagai negara besar dunia dari Asia. Pejabat China dalam berbagai kesempatan secara terbuka menyalahkan AS sebagai yang paling bertanggungjawab atas krisis global 2008. Tindakan ini mengingatkan kita akan penentangan Malaysia dengan cara-cara IMF dan AS dalam mengatasi krisis Asia.

Dalam konteks hubungan Asia dan AS, beberapa faktor saling berinteraksi. **Pertama**, menurunnya peran ekonomi Jepang dan meningkatnya peran China. **Kedua**, ada perubahan sikap China yang semakin mencoba aktif dalam kerjasama finansial regional Asia. Sedangkan Jepang sendiri menyadari menurunnya kekuatannya mencoba lebih kolaboratif dengan China sebagai mitra dalam mewujudkan kerjasama finansial regional CMI dan proses multilateralisasinya. Sedangkan ASEAN sebagai mitra bagi dua ekonomi besar

¹⁸ *Ibid*

dunia, yaitu China dan Jepang, dapat menjadi penengah kerjasama regional Asia. *Ketiga*, adanya kesamaan identitas bangsa dan ideologi pembangunan yang mengedepankan pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dan bangsa (Lihat Tabel 4.7).

Tabel 4.7

Perbandingan Krisis Asia 1998 dan Krisis Global 2008

Indikator	Krisis Asia 1998	Krisis global 2008
Sumber krisis	Asia	AS
Penyebab Krisis	- Utang luar negeri - Gelembung saham/ properti	- Kompleksitas instrumen finansial - Gelembung saham/ properti
Respon Jepang	- Membentuk AMF (gagal) - Miyazawa Initiative - CMI	- Memperkuat CMI - Mendukung CMIM
Respon AS terhadap usulan kebijakan Jepang	- Menolak AMF	- Bersikap pasif terhadap wacana CMIM
Respon China terhadap usulan kebijakan Jepang	Mendukung AS	Mendukung Jepang dan ASEAN
Kondisi Ekonomi	- Asia lemah - AS kuat	- Asia kuat - AS lemah
Aspek Ideologi	- <i>Developmental State</i>	- Ekonomi liberal